

**PERAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI PELAYANAN
ASUHAN KEBIDANAN
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh :
Fransiska Hadi Wijayanti
NIM 18.C2.0012

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019

TESIS

PERAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI PELAYANAN ASUHAN KEBIDANAN DI KABUPATEN DEMAK



dijjukan oleh

Fransiska Hadi Wijayanti

NIM: 18C20612

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Endang Wahyati, Y. S.H., M.H.

tanggal 4 Maret 2019

Pembimbing pendamping

dr. Hartanto, M.Med, SC

tanggal 6 Maret 2019

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dukur Semarang 50234
Telp. (024) 8443553, 8505003(hunting) Fax. (024) 8413429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : FRANSISKA HADI WJAYANTI

Nim : 16.02.0012

Telah dipertalukan di depan Dewan Penguji

Pada hari/tanggal : Selasa, 22 Januari 2019

Sebelum Dewan Penguji

Dosen-Penguji

1. Dr. Endang Wahyanti, SH., MH.
2. dr. Hartanto, M.Med., Sc.
3. PJ Soepriatna, SH., SpN

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik S2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari/tanggal : Selasa, 22 Januari 2019

(Dr. Endang Wahyanti, SH., MH.)

Ketua Program Studi
Magister Hukum



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Persiapan Aktivitas	
Penelitian.....	31
Tabel 2.1 Tarif pelayanan kebidanan dan neonatus (non kapitasi).....	66



DAFTAR SINGKATAN



AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
ANC	: <i>Antenatal Care</i>
BBL	: Bayi Baru Lahir
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
FKTL	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
IMD	: Inisiasi Menyusui Dini
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JKN-KIS	: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
KB	: Keluarga Berencana
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PNC	: <i>Post Natal Care</i>
SIPB	: Surat Ijin Praktik Bidan
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
UHC	: <i>Universal Health Coverage</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ijinNya, penulisan tesis dengan judul **“Peran Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Pelayanan Asuhan Kebidanan di Kabupaten Demak ”** ini dapat diselesaikan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik mandiri bidan di wilayah Kabupaten Demak telah melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan pada program JKN dengan menjadi bidan jejaring. Terdapat beberapa kualifikasi bagi bidan praktik mandiri yang bersedia untuk menjadi bidan jejaring diantaranya memiliki SIP yang masih berlaku, memiliki NPWP, lolos proses kredensialing, menandatangani perjanjian kerja sama dengan FKTP dan bersedia mematuhi ketentuan terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Pelaksanaan asuhan keperawatan gawat darurat meliputi : verifikasi persyaratan yang dibawa pasien, menentukan jenis pelayanan kebidanan, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien, melakukan rujukan bila perlu, pencatatan dan pelaporan. Peran bidan jejaring sebagai pelaksana pelayanan kebidanan pada program JKN terdiri dari dua jenis yaitu peran imperatif meliputi melaksanakan pelayanan kebidanan dan neonatal, memenuhi kewajiban kualifikasi, mencatat dan melaporkan pelayanan kebidanan, serta peran fakultatif yang dilaksanakan berupa kegiatan penunjang pelayanan kebidanan pada program JKN seperti senam hamil, pijat bayi, dan guruh vagina pada ibu nifas. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kebidanan pada program JKN yaitu faktor teknis, faktor sosial dan faktor yuridis.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof, Dr. Federik Ridwan Sanjaya,SE.,S.Kom.,MS.,IEC., selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Hukum Magister Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina Sumandjuntak,SH.CN.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan dosen pembimbing utama yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan bimbingan, serta memberikan pengarahan, dan motivasi.
4. dr. Hartanto, M.Med, SC selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan motivasi bagi penulis hingga tesis ini dapat selesai. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran dan motivasinya selama ini.
5. Para staff pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata yang telah memberikan materi kuliah yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya tesis ini.
6. Kepala Puskesmas Demak II dan segenap bidan Puskesmas Demak II , Klinik Pucang Anom, Praktik dokter mandiri Slamet Widodo yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak yang telah bersedia menjadi lahan penelitian bagi peneliti dengan memberikan sumber data primer maupun sumber data sekunder mengenai

pelaksanaan peran bidan praktik mandiri dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kebidanan ada program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Demak.

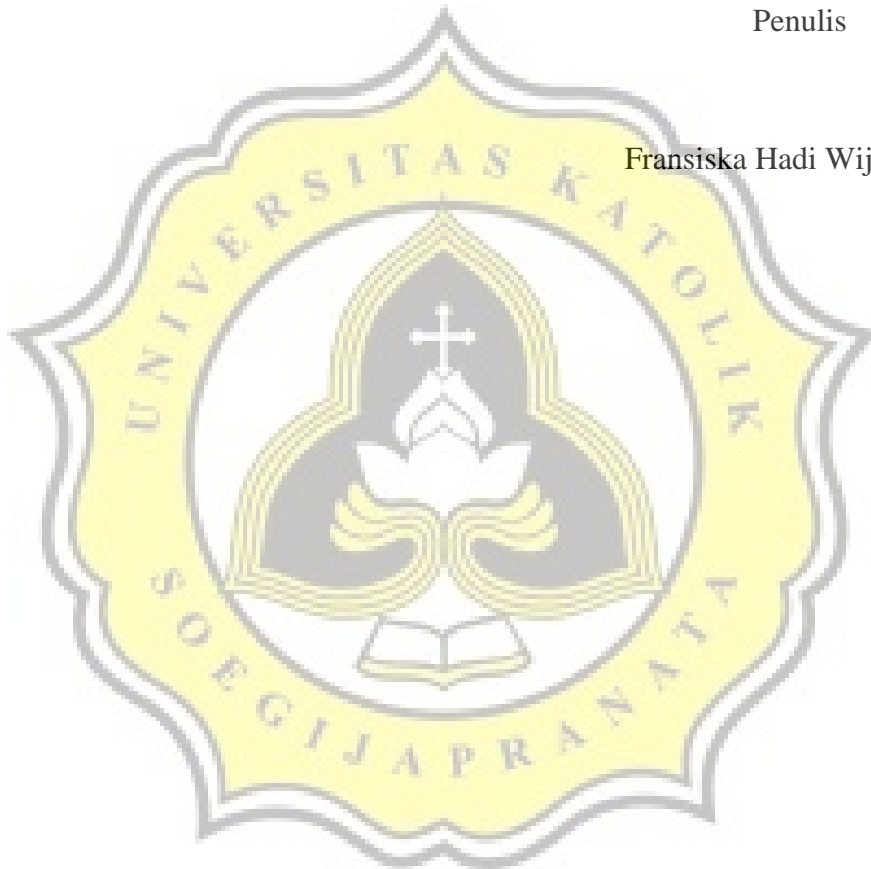
7. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata khususnya bagi angkatan 18 yang telah bersedia saling berbagi suka dan duka , berbagi pengalaman ilmu pengetahuan serta memberikan dorongan, semangat serta kerjasama yang baik selama menempuh pendidikan di UNIKA
8. Kedua orang tua dan mertua yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, bantuan dana dan dukungan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Hukum Kesehatan ini.
9. Suami tercinta Pepep Ari dan anak-anak kami Kak Chila dan Dek Shanum yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta mengajarkan kesabaran bagi penulis yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Hukum Kesehatan.
10. Seluruh Tim K119 Kudus yang telah memberikan pengertian, dukungan dan motivasi bagi penulis. Serta dek Mey-Mey yang selalu setia mendampingi saat konsul sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Hukum Kesehatan.

Serta para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Kesehatan.

Semarang,

Penulis

Fransiska Hadi Wijayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	13
1. Kerangka Konsep.....	13
2. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. PERAN.....	33
1. Pengertian Peran.....	33
2. Aspek Peran Dalam Konsep Hukum.....	34
3. Fungsi dan Jenis Peran.....	34
4. Peran Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan	35
B. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN.....	36
1. Pengertian.....	36
2. Macam Pelayanan Kesehatan.....	37
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	38
C. PUSKESMAS	39
1. Pengertian.....	39
2. Fungsi dan Tugas Puskesmas.....	40
3. Tenaga Kesehatan di Puskesmas.....	42
D. BIDAN	45
1. Pengertian	45
2. Ruang Lingkup Kewenangan Bidan	45
3. Standar Profesi Bidan.....	49
4. Hak dan Kewajiban Bidan	50
5. Bidan Jejaring.....	51
E. PRAKTIK MANDIRI BIDAN.....	53
1. Pengertian.....	53

2. Tugas Praktik Mandiri Bidan	54
F. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	56
1. Pengertian.....	56
2. Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan Nasional	58
3. Jenis Asuransi Kesehatan	59
4. Peran Pemerintah dalam Program JKN.....	60
5. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	61
6. Pelayanan Asuhan Kebidanan Pada Program JKN.....	62
G. INSTRUMEN HUKUM PRAKTIK MANDIRI BIDAN DALAM PELAYANAN JKN	64
1. Kajian Hukum Administrasi Negara.....	64
2. Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Peran Bidan dalam Program JKN.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. HASIL PENELITIAN.....	72
1. Gambaran Umum Wilayah Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak	72
2. Gambaran Umum Praktik Mandiri Bidan di Wilayah Kabupaten Demak	73
3. Alur Pemeriksaan Pasien JKN ke Bidan Jejaring	74
4. Hasil Wawancara Dengan Informan di Kabupaten Demak	75
B. PEMBAHASAN	88
1. Pengaturan Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan JKN Melalui Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak	88
2. Pelaksanaan Peran Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan pada Program JKN oleh Praktik Mandiri Bidan Sebagai Bidan Jejaring.....	99
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Bidan dalam Pemberian Asuhan Kebidanan pada Program JKN	127
BAB IV PENUTUP	132
A. KESIMPULAN	132
B. SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA	141

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR / TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis*) yang berjudul :

PERAN PRAKTEK MANDIRI BIDAN DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI PELAYANAN ATUHAN
KEBIDANAN DI KABUPATEN DEMAK

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang 15 - 8 - 2019



Franciska Hadi Wibisono

NIM: 10. C2. 0012

*) : hilangkan yang tidak sesuai

ABSTRAK

Praktik mandiri bidan merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan ibu dan anak yang diberikan melalui pelayanan asuhan kebidanan termasuk pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jenis pelayanan kebidanan yang dapat diberikan melalui program JKN menurut PMK No.69 Tahun 2013 meliputi ANC, persalinan pervaginam normal, perdarahan pasca keguguran, pelayanan KB implan, suntik, IUD dan pelayanan pra rujukan. Permasalahan yang terjadi adalah 95% penduduk Kabupaten Demak telah menjadi peserta JKN-KIS, namun jumlah praktik mandiri bidan yang terdaftar menjadi bidan jejaring hanya 11 sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya hak peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kebidanan di Kabupaten Demak akibat keterbatasan jumlah bidan jejaring.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah peran praktik mandiri bidan dalam pelaksanaan JKN melalui pelayanan asuhan kebidanan di Kabupaten Demak sebagian besar sudah berdasarkan ketentuan sesuai dengan UUD 1945, UU SJSN, UU Kesehatan, UU BPJS, dan UU Tenaga Kesehatan. Bentuk pengaturannya dituangkan dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 dimana untuk menjadi bidan jejaring harus memenuhi kualifikasi berupa memiliki SIP, memiliki NPWP, memiliki perjanjian kerja sama FKTP, terkait dengan kewenangan apabila dianalisis, kewenangan bidan jejaring adalah kewenangan atributif karena kewenangan tersebut berasal dari perundang-undangan. Peran yang dilakukan bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak meliputi peran imperatif (wajib) berupa melaksanakan pelayanan kebidanan dan neonatal dan mencatat serta melaporkan pelayanan kebidanan yang diberikan pada program JKN. Adapun peran fakultatif (tidak wajib) berupa pelayanan yang menunjang kualitas pelayanan JKN seperti kelas ibu hamil dan pijat bayi. Terdapat faktor-faktor yang mendukung pelayanan kebidanan program JKN yaitu tersedianya sarana kesehatan serta sumber daya kesehatan dan faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan kebidanan program JKN yaitu faktor teknis berupa imbalan yang terlalu kecil, faktor yuridis berupa peraturan JKN yang bersifat umum belum bersifat khusus, dan faktor sosial yaitu adanya persepsi masyarakat mengenai obat generik menyebabkan pasien tidak cepat sembuh.

Kata kunci : peran, praktik mandiri bidan, JKN, Puskesmas, asuhan kebidanan

ABSTRACT

Midwife's independent practices were to be the spearhead in implementing maternal and children services provided through midwifery care services that were included in National Health Insurance (JKN) program. The midwifery service kinds that could be provided through JKN program according to PMK Nr. 69 of 2013 included ANC, normal vaginal delivery, post-miscarriage bleeding, implant family planning services, injections, IUDs and pre-referral services. The problem was that 95% of Demak District residents had become JKN-KIS participants but the midwives who did independent practices and were registered as networking midwives were only 11. It, therefore, resulted JKN participants' rights to obtain health services failed, especially midwifery services due to the limited number of networking midwives.

This was a socio-legal study having a descriptive-analytic specification. It used primary and secondary data. The data gathering techniques were conducted by field and library studies. The data obtained were then qualitatively analyzed.

The results of the study showed that the of midwives' independent practices in implementing JKN through midwifery care services at Demak District had mostly been based on the prevailing legislations, namely 1945 Constitution, the Act on SJSN, the Act on Health, the Act on BPJS, and the Act on Health Workers. The form of the regulations were set forth in Minister of Health's Regulation (*Permenkes*) Nr. 71 of 2013 saying that a member of networking midwives should fulfill qualifications in the form of having SIP, having NPWP, having a cooperation agreement on FKTP. The authority of the networking midwives, if analyzed, was attributive authority because it was derived from legislations. The imperative role (mandatory) conducted by the networking midwives at Demak District were to carry out midwifery and neonatal services beside making records and reports on midwifery services provided by JKN program. Meanwhile, the facultative role (not mandatory) were in the forms of services supporting JKN's service quality such as classes for pregnant women and baby massage. There were supporting factors to the midwifery services in JKN program, namely the availability of the health facilities and resources. The inhibiting factors, on the other hand, were technical, namely very little rewards, JKN regulation that was still too general, not particular. Besides, there was a social factor inhibiting, namely the public perception on generic drugs that would not cause the patients not recover quickly.

Keywords: role, midwives' independent practices, JKN, Health Center, midwifery care